



**Journal of Human And Education**  
Volume 5, No. 2, Tahun 2025, pp 475-484  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri dan Berkelanjutan Melalui Pendampingan Sistem Keuangan**

**Trinandari Prasetya Nugrahanti<sup>1\*</sup>, Laela Lanjarsih<sup>2</sup>, Primadonna Ratna Mutumanikam<sup>3</sup>, Siti Safaria<sup>4</sup>, Gerardus Michael Djoko Hanantijo<sup>5</sup>**

IKPIA Perbanas Institute Jakarta

Email: [trinandari@perbanas.id](mailto:trinandari@perbanas.id)<sup>1</sup>, [laela@perbanas.id](mailto:laela@perbanas.id)<sup>2</sup>,  
[primadonnmutumanikam@perbanas.id](mailto:primadonnmutumanikam@perbanas.id)<sup>3</sup>, [siti.safaria@perbanas.id](mailto:siti.safaria@perbanas.id)<sup>4</sup>,  
[djoko.hanantijo@perbanas.id](mailto:djoko.hanantijo@perbanas.id)<sup>5</sup>

### **Abstrak**

Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel menjadi tantangan utama dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Banyak desa masih menghadapi persoalan rendahnya kapasitas aparatur dalam memahami sistem keuangan serta lemahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan desa dalam proses pengawasan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan desa melalui pendampingan sistem keuangan yang berbasis partisipatif dan pemanfaatan potensi lokal, guna mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Pengabdian dilaksanakan menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), dengan melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat sebagai mitra utama. Tahapan kegiatan meliputi perencanaan, pelatihan, pendampingan teknis, hingga evaluasi dan refleksi bersama. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan, terbentuknya tim pengelola keuangan, SOP internal, serta peningkatan peran BPD dan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa transformasi sistem keuangan desa tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga memicu perubahan kelembagaan dan sosial yang lebih luas. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa pendampingan yang kontekstual, kolaboratif, dan berbasis potensi lokal mampu mendorong perubahan nyata dalam tata kelola desa. Kontribusi kegiatan ini menjadi model pemberdayaan sistem keuangan desa yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan tantangan serupa.

**Kata kunci:** *Keuangan Desa, Pemberdayaan, Transparansi, Partisipasi, PRA.*

### **Abstract**

Transparent and accountable village financial management is a major challenge in realizing independent and sustainable villages. Many villages still face the problem of low capacity of officials in understanding the financial system and weak participation of the community and village institutions in the supervision process. This community service activity aims to empower villages through mentoring of participatory-based financial systems and utilization of local potential, in order to encourage the creation of better village financial governance. The community service is carried out using the *Participatory Rural Appraisal* (PRA) approaches, involving village officials, Village Consultative Body (BPD), and the community as the main partners. The stages of the activity include planning, training, technical assistance, to joint evaluation and reflection. The results show a significant increase in the understanding and skills of village officials in preparing financial reports, the formation of a financial management team, internal SOPs, and an increase in the role of the BPD and openness of financial information to the community. The analysis shows that the transformation of the village financial system not only has technical impacts, but also

triggers broader institutional and social changes. The conclusion of this activity is that contextual, collaborative, and local potential-based mentoring can encourage real change in village governance. The contribution of this activity is a model of empowerment of the village financial system that can be replicated in other areas with similar challenges.

**Keywords:** *Village Finance, Empowerment, Transparency, Participation, PRA.*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang bertujuan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri (Bhegawati et al., 2022). Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menjadi fondasi bagi terwujudnya desa mandiri dan berkelanjutan, di mana desa tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal, tetapi mampu merencanakan dan menjalankan pembangunan secara otonom dengan potensi yang dimilikinya (Ilham & Lusiani, 2022).

Namun, dalam implementasinya, banyak desa masih menghadapi kendala dalam mengelola keuangan secara efektif. Permasalahan seperti rendahnya kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan, lemahnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi hambatan utama (Zulaifah, 2020). Akibatnya, tidak sedikit desa yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan, temuan audit, hingga penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan masyarakat secara luas (Wiguna & Dwilingga, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa adanya alokasi dana yang besar ke desa tidak serta-merta menjamin terjadinya percepatan pembangunan jika tidak dibarengi dengan penguatan sistem dan sumber daya manusia (Wibowo, 2021).

Dalam konteks tersebut, pendampingan sistem keuangan desa menjadi salah satu pendekatan strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi desa. Pendampingan bukan hanya sekadar memberi pelatihan teknis, tetapi juga mencakup proses pemberdayaan, transformasi nilai, serta pendampingan berkelanjutan agar desa mampu membangun sistem keuangan yang tangguh. Pendekatan ini menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek bantuan. Dengan kata lain, pendampingan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa sehingga mampu mengelola sumber daya keuangan secara mandiri dan akuntabel (Kamil, 2018).

Yang menjadikan pengabdian ini unik adalah pendekatan holistik yang digunakan dalam pendampingan, yakni tidak hanya berfokus pada aspek teknis administrasi keuangan, tetapi juga menyentuh dimensi budaya kerja, tata kelola pemerintahan, hingga penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa. Selain itu, pengabdian ini juga memanfaatkan teknologi digital secara adaptif, melalui pengenalan sistem informasi keuangan desa berbasis aplikasi sederhana yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan desa sasaran (Wahyuni et al., 2021). Hal ini berbeda dari pendekatan konvensional yang umumnya hanya memberikan pelatihan sesaat tanpa pendampingan lanjutan yang konsisten.

Jika ditinjau dari kegiatan pengabdian sebelumnya, sebagian besar kegiatan serupa lebih menekankan pada pelatihan satu arah yang bersifat formal dan birokratis. Kurangnya kesinambungan, keterlibatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi berbasis lokal menjadi celah (gaps) yang belum banyak disentuh dalam program-program sebelumnya (Salsabila et al., 2020). Kegiatan pengabdian ini mencoba menjembatani kesenjangan tersebut dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan, sehingga dampak yang dihasilkan tidak hanya jangka pendek, tetapi mampu menciptakan perubahan struktural dalam tata kelola keuangan desa (Sugiarti, 2020).

Tujuan dari artikel pengabdian ini adalah untuk mendeskripsikan proses dan hasil pendampingan sistem keuangan desa yang dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan, serta menganalisis sejauh mana intervensi ini dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan. Harapan dari pengabdian ini tidak hanya sebatas pada meningkatnya kualitas laporan keuangan desa atau terlaksananya pelatihan semata. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk karakter desa yang lebih mandiri, memiliki tata kelola keuangan yang baik, dan mampu mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, diharapkan tercipta ekosistem desa yang sehat secara administratif, kuat secara kelembagaan, dan tangguh dalam menghadapi tantangan pembangunan. Desa tidak lagi menjadi entitas yang tertinggal, melainkan menjadi aktor utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

## **METODE**

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini mengadopsi pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang dipadukan dengan prinsip-prinsip tertentu. Pendekatan ini menempatkan masyarakat desa sebagai aktor utama sekaligus mitra dalam seluruh tahapan kegiatan, sehingga proses pengabdian tidak bersifat top-down, melainkan partisipatif dan berbasis pada potensi yang sudah dimiliki desa (Sandham et al., 2019). Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Jambudipa, yang berada di Kec. Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, selama kurun waktu tiga (3) bulan, yaitu dari bulan Maret hingga Mei 2025. Target atau mitra utama dalam kegiatan ini adalah masyarakat, aparatur pemerintah desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan pengelola keuangan desa (Kaur Keuangan dan Bendahara), serta tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kolaborasi Tim dosen antar perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk membangun kapasitas kolektif dalam pengelolaan keuangan desa secara akuntabel dan berkelanjutan.

Tahapan pengabdian dimulai dari perencanaan program dengan melakukan pemetaan kebutuhan melalui survei awal dan diskusi informal dengan perangkat desa. Setelah diperoleh gambaran kebutuhan dan potensi desa, tim pengabdian melakukan koordinasi dan perizinan resmi kepada pemerintah desa dan kecamatan. Pada tahap persiapan, disusun modul pelatihan, alat bantu visual, dan perangkat monitoring sederhana berbasis aplikasi keuangan desa. Tahap pelaksanaan dilakukan secara bertahap melalui kegiatan lokakarya, pelatihan teknis, pendampingan intensif, dan simulasi penyusunan laporan keuangan. Teknik pengumpulan data mencakup observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah pelatihan. Sumber data terdiri dari data primer (hasil observasi dan wawancara) serta data sekunder (dokumen APBDes, laporan realisasi anggaran, dan peraturan desa). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan triangulasi sumber dan teknik. Selain itu, dilakukan uji korelasi sederhana untuk mengukur hubungan antara peningkatan pemahaman keuangan dengan efektivitas penyusunan laporan keuangan desa. Tahap akhir berupa monitoring dan evaluasi, yang dilakukan bersama perangkat desa untuk menilai efektivitas pendampingan dan menyusun rencana tindak lanjut. Evaluasi ini juga melibatkan refleksi bersama agar hasil pengabdian dapat berkelanjutan dan direplikasi secara mandiri oleh desa di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang mengusung tema "Pemberdayaan Desa menuju Desa Mandiri dan Berkelanjutan melalui Pendampingan Sistem Keuangan Desa" menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola keuangan secara lebih baik dan akuntabel. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta pelatihan, ditemukan peningkatan rata-rata skor pemahaman terhadap konsep dasar pengelolaan keuangan desa sebesar 37%. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pendekatan pelatihan partisipatif dan pendampingan intensif yang dilakukan selama kegiatan. Uji korelasi sederhana yang dilakukan antara tingkat pemahaman dan kemampuan teknis menyusun laporan keuangan menunjukkan nilai koefisien positif

yang cukup kuat ( $r = 0,68$ ), yang mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman diikuti oleh peningkatan kemampuan teknis yang relevan. Peningkatan kapasitas ini juga tercermin dalam kegiatan pelatihan manajemen dan akuntansi keuangan yang dilakukan untuk pelaku UMKM di wilayah Kadudampit, Sukabumi, yang mampu memperkuat ekonomi lokal melalui pencatatan keuangan yang tertib dan terstandar (Nugrahanti, Lanjarsih, & Mutumanikam, 2024).

Selain peningkatan individu, pengabdian ini juga mendorong perubahan kelembagaan, terutama dalam aspek tata kelola dan pembagian tugas pengelolaan keuangan desa. Sebelum kegiatan pendampingan dilakukan, banyak fungsi pengelolaan keuangan hanya terpusat pada satu atau dua orang saja, dan hal ini menjadi sumber ketidakefisienan serta rawan kesalahan administrasi (Saputra et al., 2020). Namun setelah dilakukan pelatihan dan simulasi pembagian peran, perangkat desa mulai mengadopsi pembagian kerja yang lebih jelas dan sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan desa (Kusumawati & Sadik, 2016). Bahkan, dalam minggu ketiga pendampingan, desa mitra mulai menyusun SOP (Standard Operating Procedure) internal untuk pencatatan transaksi dan pelaporan berkala, sebuah kemajuan yang sebelumnya belum pernah dilakukan secara sistematis.

Dari sisi penggunaan teknologi, desa mitra mulai terbuka terhadap penggunaan aplikasi sederhana berbasis Excel untuk pencatatan dan pengelompokan anggaran, serta untuk menyusun laporan keuangan yang lebih rapi dan mudah dipahami. Salah satu hasil yang menonjol adalah terbentuknya tim kerja kecil yang terdiri dari tiga orang perangkat desa yang secara rutin melakukan rekapitulasi anggaran setiap dua minggu sekali (Wardani, N. W., & Ginantra, 2020). Praktik ini sebelumnya tidak dilakukan karena tidak ada kebiasaan kerja terjadwal dan minimnya pemahaman akan pentingnya kontrol anggaran secara periodik. Melalui pelatihan teknis dan pendampingan langsung, tim ini menunjukkan kemampuan yang meningkat dalam menyusun laporan realisasi anggaran secara tepat waktu dan sesuai format yang ditentukan oleh regulasi. Pendekatan edukasi dan pendampingan keuangan seperti ini juga terbukti efektif dalam konteks pemberdayaan pelaku UMKM dalam membantu para pelaku usaha memahami perhitungan laba-rugi serta meningkatkan kemampuan pencatatan transaksi secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan berbasis praktik mampu menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan ekonomi di tingkat komunitas (Herianti et al., 2024).

Secara kelembagaan, partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan juga mengalami penguatan. BPD yang sebelumnya hanya berperan pasif, mulai aktif mengikuti rapat evaluasi anggaran dan meminta salinan laporan realisasi kegiatan. Ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pengawasan yang berbasis kesadaran, bukan hanya karena kewajiban formal. Temuan ini menjadi penting karena penguatan sistem keuangan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis aparatur desa, tetapi juga pada keberadaan sistem pengawasan internal aktif kritis.

Hasil lainnya yang tidak kalah penting adalah tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya transparansi kepada masyarakat. Dalam salah satu kegiatan evaluasi bersama, perangkat desa berinisiatif membuat papan informasi digital yang menampilkan ringkasan penggunaan dana desa setiap bulan. Informasi ini diunggah melalui grup WhatsApp warga dan juga ditempel di balai desa. Hal ini menunjukkan perubahan budaya kerja yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Warga desa yang sebelumnya cenderung tidak terlibat dalam urusan keuangan desa, mulai menunjukkan ketertarikan dan bahkan mengajukan pertanyaan terkait prioritas penggunaan dana.

Kegiatan pengabdian ini berhasil membentuk fondasi awal bagi terciptanya sistem keuangan desa yang lebih akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatan PRA terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan perangkat desa dalam proses transformasi tata kelola keuangan (Yulian et al., 2022). Pendampingan yang dilakukan secara konsisten, ditambah dengan penerapan teknologi sederhana yang sesuai dengan kondisi desa, memungkinkan terciptanya perubahan nyata yang dapat dijaga keberlanjutannya. Dengan capaian ini, desa mitra dinilai layak menjadi model percontohan bagi pengembangan sistem keuangan desa di wilayah lain yang menghadapi tantangan

serupa.



Gambar 1. Narasumber Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan



Gambar 2. Peserta Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan

Gambar 1 dan 2 diatas adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan sistem keuangan Desa dengan narasumber dari para Dosen. Kegiatan ini diharapkan akan benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan dan kemajuan Desa.

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Sistem Keuangan Desa Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Aspek	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
Pemahaman Aparatur Desa	Rendah, hanya memahami aspek administratif secara formal	Meningkat, memahami prinsip akuntabilitas, transparansi, dan regulasi
Pencatatan Keuangan	Manual dan tidak terstruktur	Terstruktur menggunakan format baku berbasis Excel
SOP Internal	Tidak tersedia	Disusun dan diterapkan secara bertahap
Peran BPD	Pasif, hanya menerima laporan akhir	Aktif dalam pengawasan dan evaluasi anggaran
Transparansi Keuangan	Informasi terbatas, hanya di musyawarah tahunan	Disampaikan secara berkala melalui papan informasi & grup digital
Partisipasi Masyarakat	Minim, tidak dilibatkan dalam pengawasan	Meningkat, mulai aktif bertanya dan memberi masukan
Tim Pengelola Keuangan	Belum terbentuk	Terbentuk dengan pembagian tugas dan jadwal kerja yang jelas
Kesadaran Kolektif	Belum muncul, dianggap sebagai tugas individu	Terbangun sebagai tanggung jawab bersama pemerintah desa

Tabel 1 di atas menunjukkan bagaimana intervensi melalui pendampingan sistem keuangan desa berdampak secara langsung pada perbaikan kualitas tata kelola desa. Setiap aspek menunjukkan perubahan tidak hanya dalam dimensi teknis, seperti pencatatan dan pelaporan, tetapi juga dalam aspek sosial, seperti partisipasi, pengawasan, dan kesadaran kolektif. Misalnya, sebelum pengabdian, informasi keuangan hanya disampaikan saat musyawarah tahunan, sedangkan setelahnya, perangkat desa secara proaktif memberikan informasi bulanan kepada masyarakat. Ini menandakan adanya transformasi budaya kerja dan peningkatan akuntabilitas publik yang signifikan. Tabel ini juga dapat dijadikan alat evaluasi untuk mereplikasi pendekatan serupa di desa-desa lain dengan permasalahan sejenis, karena menggambarkan dengan jelas titik awal dan capaian yang dihasilkan dalam waktu yang terukur.

Analisis terhadap hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis partisipatif dan penguatan aset komunitas memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Temuan ini selaras dengan kajian teoretis yang dikemukakan oleh Chambers (1994) dalam pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), di mana masyarakat lokal dianggap sebagai pelaku utama pembangunan yang memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk memetakan permasalahan dan solusi mereka sendiri (Miliyanti et al., 2022). Peningkatan signifikan dalam pemahaman aparatur desa terhadap sistem keuangan, serta inisiatif pembentukan SOP dan penggunaan teknologi, menunjukkan bahwa pendampingan yang bersifat dialogis dan kolaboratif lebih berhasil mendorong perubahan internal daripada sekadar pelatihan satu arah.

Jika dibandingkan dengan pengabdian serupa yang dilakukan sebelumnya di beberapa wilayah lain yang cenderung hanya mengandalkan pelatihan formal dan berakhir tanpa tindak lanjut kegiatan ini menunjukkan capaian yang lebih substantif dan berkelanjutan. Misalnya, dalam studi pengabdian yang menggunakan pendekatan pelatihan konvensional, ditemukan bahwa pemahaman peserta meningkat saat pelatihan, namun tidak berdampak signifikan terhadap perubahan kebiasaan kerja atau pembentukan sistem internal desa (Pasaribu et al., 2023). Sebaliknya, dalam pengabdian ini, proses pendampingan yang berkelanjutan mampu memicu pembentukan struktur kerja baru, seperti tim keuangan desa dan penerapan sistem rotasi tugas, yang sebelumnya belum ada. Ini menguatkan gagasan bahwa penguatan kapasitas tidak cukup dilakukan melalui transfer ilmu, tetapi harus melalui pembiasaan praktik dan internalisasi nilai-nilai tata kelola yang baik.

Dari sudut pandang teori kelembagaan, pendekatan ini juga relevan dengan pandangan Ostrom (1990) tentang pentingnya aturan dan norma lokal dalam pengelolaan sumber daya secara kolektif. Adanya pembentukan SOP internal oleh aparatur desa secara mandiri menandakan bahwa desa mulai mengembangkan institusi lokalnya sendiri sebagai mekanisme untuk mengelola keuangan secara lebih tertib (Ariadi, 2019). Dalam konteks ini, hasil pengabdian menunjukkan bahwa ketika desa diberikan ruang untuk mengembangkan aturan utamanya sendiri dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, maka kepatuhan dan keberlanjutan pelaksanaan menjadi lebih tinggi dibandingkan aturan yang dipaksakan dari luar.

Keterlibatan aktif BPD dalam proses evaluasi dan pengawasan anggaran juga menunjukkan adanya penguatan modal sosial dan pengembangan tata kelola kolaboratif. Ini sesuai dengan konsep *good governance* yang menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan publik (Larisu & Jopang, 2022). Berbeda dari pengabdian sebelumnya yang sering mengabaikan peran BPD, pengabdian ini justru berhasil mengaktifkan peran BPD sebagai pengawas internal desa melalui pelibatan sejak tahap awal perencanaan hingga evaluasi kegiatan (Seftiono et al., 2022). Ini membuktikan bahwa jika diberikan ruang dan pemahaman yang memadai, lembaga desa seperti BPD dapat menjadi pengawal tata kelola yang lebih akuntabel.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bukan hanya menghasilkan perubahan teknis dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga mendorong transformasi sosial dan kelembagaan di tingkat desa. Hal ini menguatkan posisi bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan tidak hanya dapat diukur dari seberapa cepat dana diserap atau laporan disusun, tetapi juga dari seberapa kuat institusi lokal tumbuh dan berkembang. Analisis ini

memperlihatkan bahwa keberhasilan pengabdian tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang inklusif, berbasis potensi lokal, dan berkelanjutan, yang secara teoritis dan praktis terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan intervensi jangka pendek yang tidak berbasis pada dinamika dan kapasitas desa sendiri.

Analisis yang lebih mendalam terhadap hasil pengabdian ini mengungkap dinamika penting dalam proses transformasi tata kelola keuangan desa sebagai bagian dari upaya menuju kemandirian dan keberlanjutan desa. Salah satu indikator keberhasilan yang signifikan adalah terjadinya perubahan pola pikir (*mindset*) dari para aparatur desa terkait peran dan tanggung jawab mereka dalam mengelola dana publik (Gea et al., 2022). Sebelumnya, banyak aparatur desa menganggap tugas pengelolaan keuangan hanyalah kewajiban administratif yang bersifat formalitas, tanpa memahami implikasi jangka panjang terhadap pembangunan desa (Rosari et al., 2022). Namun, setelah dilakukan proses pendampingan yang menekankan makna transparansi dan akuntabilitas, muncul kesadaran bahwa keuangan desa bukan semata soal laporan, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan masyarakat dan efektivitas pembangunan.

Perubahan ini tidak hanya terlihat dari peningkatan pemahaman, tetapi juga tercermin dalam tindakan konkret, seperti pembentukan tim kerja, SOP internal, dan rutinitas evaluasi anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa transfer pengetahuan telah berhasil melewati tahap kognitif dan masuk ke tahap afektif serta psikomotorik dimana pengetahuan tidak hanya dipahami, tetapi diyakini dan dilaksanakan. Dari perspektif pengembangan kapasitas organisasi, ini merupakan lompatan penting karena menunjukkan bahwa desa mulai menginternalisasi nilai-nilai tata kelola modern tanpa menghilangkan identitas lokalnya (Aini & Adiando, 2023). Proses ini sangat penting untuk keberlanjutan karena perubahan yang berangkat dari kesadaran sendiri cenderung lebih tahan lama dibandingkan perubahan karena tekanan eksternal. Pelatihan keterampilan manajerial yang dikembangkan bagi pelaku usaha kecil juga telah terbukti mendorong peningkatan daya saing secara signifikan di berbagai wilayah, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi (Nugrahanti, Marsasi, Semmawi, Gusti, & Azizi, 2024).

Aspek lain yang perlu digarisbawahi adalah munculnya inisiatif-inisiatif lokal yang bersifat inovatif namun kontekstual, seperti penggunaan media digital sederhana untuk menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini menandai pergeseran menuju budaya transparansi yang sebelumnya belum menjadi kebiasaan dalam praktik pemerintahan desa. Ketika perangkat desa secara sukarela menyusun ringkasan realisasi anggaran dan menyebarkannya lewat media yang mudah diakses oleh warga, ini bukan hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara pemerintah desa dan warganya (Legowo et al., 2021). Kepercayaan publik pun mulai tumbuh, sebagaimana tercermin dari meningkatnya partisipasi warga dalam forum-forum diskusi desa pasca intervensi.

Transformasi tersebut mencerminkan bahwa penguatan sistem keuangan desa tidak hanya berdampak pada tata kelola administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial-politik yang luas. Dalam masyarakat desa, hubungan antarindividu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan keterbukaan. Ketika sistem keuangan mulai terbuka, perasaan memiliki dari masyarakat pun meningkat (Hidayat et al., 2022). Dengan kata lain, transparansi menciptakan ruang bagi kontrol sosial yang sehat, yang pada gilirannya memperkuat integritas pemerintahan desa. Ini selaras dengan teori-teori pembangunan partisipatif yang menekankan pentingnya legitimasi sosial dalam memastikan keberlangsungan institusi publik di tingkat akar rumput (Ashari & Nugrahanti, 2021)

Tidak kalah pentingnya adalah temuan mengenai peran kolektif dalam pengelolaan keuangan, yang mencerminkan adanya kecenderungan menuju model tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Model ini sangat relevan dengan konteks desa, di mana hubungan antarwarga bersifat erat dan saling tergantung. Ketika perangkat desa, BPD, dan masyarakat mulai berinteraksi dalam pengawasan anggaran dan pelaporan keuangan, maka kontrol tidak lagi bersifat hirarkis atau formal saja, tetapi juga informal dan horizontal. Pengawasan informal ini justru kerap kali lebih efektif karena berbasis pada norma sosial dan tekanan komunitas yang kuat, terutama di desa-desa yang masih memegang nilai-nilai komunal.

Keberhasilan lain yang patut dicatat adalah munculnya keinginan dari pihak desa

untuk melakukan replikasi dan pengembangan sistem secara mandiri. Dalam diskusi akhir kegiatan, beberapa perangkat desa menyampaikan rencana untuk mengembangkan aplikasi pencatatan sederhana ke dalam bentuk dashboard visual yang lebih mudah dipahami oleh warga. Meskipun hal ini masih bersifat wacana, namun menunjukkan adanya keberanian untuk berinovasi dan keinginan kuat untuk memperbaiki sistem secara berkelanjutan. Inisiatif lokal seperti pengembangan aplikasi keuangan desa dan pelibatan generasi muda dalam literasi keuangan juga sejalan dengan program pelatihan investasi cerdas yang dirancang untuk menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan ekonomi masa depan secara adaptif dan visioner (Nugrahanti, Mutumanikam, Lanjarsih, & Hanantijo, 2024). Sikap ini penting karena menunjukkan bahwa desa mulai memiliki agency kemampuan untuk menentukan nasib dan arah pembangunannya sendiri. Ini adalah fondasi utama menuju desa mandiri yang tidak hanya bergantung pada intervensi luar, tetapi mampu berkembang berdasarkan potensi dan refleksi internal.

Terakhir, dari sisi keberlanjutan, penguatan sistem keuangan desa memiliki implikasi jangka panjang terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa. Dengan tata kelola keuangan yang semakin baik, prioritas pembangunan dapat ditetapkan secara lebih rasional dan berbasis data (Andaningsih et al., 2022). Hal ini membuka ruang bagi perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang lebih terukur dan realistis, serta penganggaran berbasis kinerja yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi penggunaan dana desa. Bila tren positif ini terus dikawal dan dikembangkan, maka desa dapat benar-benar menjadi episentrum pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa transformasi keuangan desa bukan hanya soal teknis pelaporan atau administrasi, tetapi bagian dari proses besar menuju peradaban tata kelola desa yang sehat. Ketika pengelolaan keuangan mulai transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka seluruh dimensi kehidupan desa turut terdorong untuk berkembang secara lebih baik dan bermartabat. Penguatan sistem keuangan desa bukanlah tujuan akhir, tetapi gerbang menuju lahirnya desa yang berdaulat secara ekonomi, sosial, dan politik.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa pemberdayaan desa menuju kemandirian dan keberlanjutan tidak dapat dilepaskan dari penguatan sistem keuangan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Fenomena masih lemahnya tata kelola keuangan desa, yang selama ini cenderung administratif dan minim partisipasi, terjawab melalui proses pendampingan yang berbasis kesadaran kolektif dan pengembangan kapasitas lokal. Hasil yang dicapai, mulai dari meningkatnya pemahaman perangkat desa, terbentuknya tim pengelola keuangan, hingga munculnya inisiatif transparansi ke publik, menunjukkan bahwa desa mampu melakukan transformasi sistemik ketika diberikan ruang dan dukungan yang sesuai dengan konteks sosialnya. Hal ini menjadi titik balik penting dalam mendorong desa untuk tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban formal, tetapi juga membangun sistem yang berakar dari nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sosial.

Meski demikian, pengabdian ini juga memiliki sejumlah keterbatasan. Waktu pelaksanaan yang relatif singkat menyebabkan pendampingan belum sepenuhnya mengakomodasi proses internalisasi dan adaptasi secara menyeluruh, khususnya dalam menghadapi dinamika politik dan perubahan regulasi desa. Selain itu, pendekatan yang digunakan masih bersifat eksperimental dan belum teruji dalam jangka panjang, sehingga perlu ada proses pemantauan lanjutan untuk memastikan keberlanjutan praktik yang sudah terbentuk. Oleh karena itu, saran untuk pengabdian berikutnya adalah memperpanjang durasi kegiatan serta memperkuat sinergi lintas sektor, seperti menggandeng lembaga pengawas, akademisi, dan komunitas lokal agar proses penguatan sistem keuangan desa tidak hanya berhenti pada pendampingan, tetapi tumbuh menjadi gerakan kolektif desa yang berkesinambungan. Hal ini menegaskan pentingnya penyuluhan dan edukasi berbasis komunitas dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu sosial dan pembangunan, sebagaimana juga diterapkan dalam program penyuluhan di tingkat dusun yang menunjukkan dampak signifikan dalam membangun

pemahaman dan perubahan perilaku warga (Rachmawati et al., 2023).

## UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih atas tenaga, pikiran, dan kontribusi lainnya yang dilakukan oleh beberapa dosen. Semoga pengabdian ini akan terus berlanjut dan membuahkan hasil yang lebih baik lagi. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada penerbit artikel pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, F. H., & Adianto, A. (2023). Tata Kelola BUMDesa Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2524–2531.
- Andaningsih, I. G. P. R., Trinandari, T., Novita, N., & Kurnia, K. (2022). Pemberdayaan UMKM Melalui Digitalisasi Keuangan Menggunakan Aplikasi Catatan Keuangan di Pasar Kranggan Wilayah Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi Jawa Barat. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 143–155.
- Ariadi, A. (2019). Bantu Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Ashari, H., & Nugrahanti, T. P. (2021). Pencatatan Provisi Pada Otoritas Penjamin Simpanan: (Studi Pada Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia). *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 1–14.
- Bhegawati, D. A. S., Ribek, P. K., & Verawati, Y. (2022). Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Melalui Peran Kewirausahaan. *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL*, 1(1), 21–26.
- Gea, I. V., Saleh, M., & Suharto, R. B. (2022). Peranan corporate social responsibility (CSR) terhadap tingkat pembangunan desa. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(3), 551–560. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i3.11545>
- Herianti, E., Marundha, A., Nugrahanti, T. P., Tarigan, K., Herninta, T., & Veny, V. (2024). Financial Management Education For Msmes As A Tool To Determine Business Profit And Loss: Community Service To Kadudampit District, Sukabumi Regency. *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(3), 988–998.
- Hidayat, M., Salam, R., Hidayat, Y. S., Sutira, A., & Nugrahanti, T. P. (2022). Sustainable Digital Marketing Strategy in the Perspective of Sustainable Development Goals. *Komitmen J. Ilm. Manaj*, 3(2), 100–106.
- Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 180–192.
- Kamil, I. (2018). Peran Komunikasi Pemerintahan dalam Penanganan Lingkungan Kumuh. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11(1). <https://doi.org/10.29313/mediator.v11i1.3322>
- Kusumawati, F., & Sadik, J. (2016). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah pengolah sabut kelapa melalui inkubator bisnis dan Teknologi Tepat Guna. *Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi*, 10(2), 186–210.
- Larisu, Z., & Jopang, J. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Optimalisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Desa Di Kabupaten Muna. *Sebatik*, 26(2), 622–629. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2050>
- Legowo, M. B., Widiiputra, H. D., & Nugrahanti, T. P. (2021). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi Digital Untuk UMKM di Wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 2(2), 76–90.
- Miliyanti, N., Rinaldy, R., & Alghifari, R. (2022). Application of Participatory Rural Appraisal (PRA) Techniques in Waste Problems in Sukamanis Village Kadudampit District. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(9). <https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i9.2111>
- Nugrahanti, T. P., Lanjarsih, L., & Mutumanikam, P. R. (2024). Education on Financial Management and Accounting in Improving the Local Village Economy in MSMEs in Kadudampit Sukabumi District. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 5891–5898.
- Nugrahanti, T. P., Mutumanikam, P. R., Lanjarsih, L., & Hanantijo, D. (2024). Pelatihan Investasi Cerdas Bagi Generasi Muda Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Masa Depan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(6), 12097–

12103.

- Nugrahanti, T. P., Marsasi, E. G., Semmawi, R., Gusti, Y. K., & Azizi, M. (2024). Pengembangan Pelatihan Keterampilan Manajerial Bagi Pengusaha Kecil Dan Menengah Dalam Meningkatkan Daya Saing Bisnis Di Era Digital. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 2747-2753.
- Pasaribu, M. K., Larasati, A. N., Siahaan, D. F., & Manik, B. (2023). Upaya Peningkatan Penjualan pada UMKM Tahu Sumedang Putri Deli Medan melalui Kemasan Ramah Lingkungan dan Strategi Digital Marketing. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 57-67. <https://doi.org/10.53299/bajpm.v3i1.275>
- Rachmawati, D. W., Mulyana, Y., PN, T., Zuliyana, M., Agustina, J., & Permatasari, N. (2023). Penyuluhan Seks Bebas Di Yayasan Wasangkerta Dusun Karangdawa Kecamatan Setu Patok Cirebon Jawa Barat. *Journal of Smart Community Service*, 1(2), 83-92. <https://journal.cahyaedu.com/index.php/jscs/article/view/24>
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3040-3049.
- Salsabila, U. H., Lestari, W. M., Habibah, R., Andaresta, O., & Yulianingsih, D. (2020). Pemanfaatan teknologi media pembelajaran di masa pandemi covid-19. *Trapsila: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2), 1-13.
- Sandham, L. A., Chabalala, J. J., & Spaling, H. H. (2019). Participatory rural appraisal approaches for public participation in EIA: Lessons from South Africa. *Land*, 8(10), 150.
- Saputra, B. T. T., Suyanto, S., & Ali, K. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 1(1), 17-29.
- Seftiono, H., Wong, A., & Gunawan, I. I. (2022). Pendampingan Regulasi Kemasan Pangan Secara Daring bagi UMKM di Desa Wisata Provinsi Bali. *Transformatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 13-22. <https://doi.org/10.22515/tranformatif.v3i1.4700>
- Sugiarti, S. (2020). Penerapan Tata Kelola Keuangan Pada Pelaku Usaha Di Kelurahan Jimus Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Wahyuni, S., Nugroho, W. S., Purwantini, A. H., & Khikmah, S. N. (2021). Pengaruh E-Commerce, Budaya Organisasi, Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kota Magelang. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021*, 1(1).
- Wardani, N. W., & Ginantra, N. L. W. S. R. (2020). Pelatihan Aplikasi Mendeley untuk Referensi dalam Menulis Karya Ilmiah Bagi Guru SMK Dwijendra Denpasar. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1), 13-20. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v1i1.279>
- Wibowo, H. (2021). Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Melalui Bada Usaha Milik Desa (Bumdes) Menuju Koperasi Berbasis It. *An Nawawi*, 1(1), 53-70. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i1.9>
- Wiguna, K. Y., & Dwilingga, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 5(2), 167. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2883>
- Yulian, J., Ahmad Adi, S., & Siti Rachmi, I. (2022). Pendekatan Partisipatif Dalam Program Bahari Sembilang Mandiri Sebagai Upaya Peningkatan Inisiatif Lokal. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(7). <https://doi.org/10.58344/locus.v1i7.168>
- Zulaifah, I. A. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlungang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 130-141. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>